

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI NEW MALL PASAR SENTRAL KOTA MAKASSAR

M Afif Adityawan Anwar<sup>1\*</sup>, Muhlis Madani<sup>2</sup>, Anwar Parawangi<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this study was to find out how to implement the Government in Relocating Street Vendors and the factors that supported and inhibited the Implementation of Government Policy in Relocating Street Vendors (PKL) at the New Mall Sentral Market Makassar City. This research used descriptive qualitative and qualitative methods. The number of informants in this study were 4 people. The results of the study stated that the Implementation of Government Policy in Relocating Street Vendors in the Sentral Market of Makassar City was carried out by: communicating the relationship through discussion, meetings and socialization; increasing resources in the form of increasing the number of staff, do position in the form of management assistance and security of traders who wanted to be relocated: and facilitated the bureaucratic structure to be more effective in handling relocation. Supporting factor in the Implementation of Government Policy in Relocating Street Vendors (PKL) in New Market Pasar Makassar City Mall, consisted of: internal factors, in the form of the sellers who wanted to be relocated to a more comfortable place and not burdensome in terms of contributions.*

**Keywords:** policy implementation, relocation, street vendors

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Lima di Pasar Sentral Kota Makassar dilakukan dengan cara: mengomunikasikan relokasi melalui diskusi, rapat dan sosialisasi; melakukan peningkatan sumberdaya dalam bentuk menambah jumlah staf, melakukan disposisi dalam bentuk pendampingan penataan dan pengamanan pedagang yang ingin direlokasi: dan memudahkan struktur birokrasi agar lebih efektif dalam penanganan relokasi. Faktor yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar, terdiri atas: faktor internal, berupa keadaan diri pedagang untuk mau direlokasi ke tempat yang lebih nyaman dan tidak memberatkan dari sisi iuran.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, relokasi, pedagang kaki lima

---

\* mafifadityawan@gmail.com

## PENDAHULUAN

Implementasi adalah tahap paling penting dalam administrasi publik karena merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan. Anderson dalam Tachjan (2016:19). Tahap yang penting dalam implementasi kebijakan adalah menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti telah direncanakan. (Dwiyanto Indiahono, 2016:143).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Suratman (2017:26).

Suharto (2002) sektor informal mencakup operator usaha kecil yang menjual makanan dan barang atau menawarkan jasa dan pada gilirannya melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini disebut sebagai sektor informal perkotaan.

Definisi-definisi tentang PKL di atas menunjukkan bahwa siapa saja berpeluang untuk menjadi PKL, kemudahan ini mendorong pesatnya jumlah PKL di kota-kota karna usaha ini cukup menjanjikan bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal, serta bagi mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan Mustafa (2008:9) menyatakan bahwa jenis usaha sektor ini paling berpengaruh karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah ke bawah.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf, 2002:234) selanjutnya menurut *International Labour Organization* (ILO) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru,

menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, ketrampilan yang dibutuhkan dipeoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak di pasar persaingan penuh.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya.

Selanjutnya dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari kacamata positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya

kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal.

Asal dari kata kebijakan dan publik. Menurut Islamy (1991) dalam Wahab (2001) kebijakan public (public policy) adalah Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat. Suatu proses kebijakan, menurut Charles O. Jones dalam Wahab (2001, h.29) sedikitnya terdapat empat golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yaitu: golongan rasionalis, golongan teknisi dan golongan inkrementalis serta golongan reformis.

Syafiie dalam Tahir (2014:20) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan

mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbalik dan tindakan terarah, sedangkan menurut Anderson menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah Anderson (1984) dalam Tahir (2014).

Sementara itu, Carl Friedrich dalam Wahab (2001) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yakni: "Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka ke kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil

atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam meng-implementasikan kebijakan tersebut." (Andrew Dunsire dalam Wahab, 2001).

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2001:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadimistrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

George C. Edward III dalam Subarsono (2011) Implementasi Kebijakan di pengaruhi 4 (empat) variabel yaitu : (a) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, (b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial, (c) disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, (d) struktur

birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement*. Webster's Dictionary (Suratman: 2017:25), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Mulyadi, 2016:36) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut (Wahab, 2010:68) Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Ada Dua konsep pendekatan studi implementasi. Pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Implementasi merupakan sala satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi di lihat sebagai: "administration of the law in which various actors, organization, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals" (Anderson, 1990:172). Dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disyahkan dalam bentuk hukum) dengan mengarahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai bidang kajian (*field of study*). Perspektif ini tidak dapat di lepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk

memahami problematika itu sendiri. Implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai elemen penting, yaitu: subject matter (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di PD Pasar Makassar Raya kota Makassar dan khususnya di lokasi yang kini ditempati PKL yaitu di Pasar Sentral yang terletak di jalan KH Ramli sampai dengan Jalan HOS Cokroaminoto.

Pemilihan Pasar Sentral sebagai lokasi penelitian yaitu karena isu tentang relokasi PKL di pasar tersebut memang sedang hangat dibicarakan dengan fakta yang ada yaitu hanya beberapa PKL saja yang menempati kios-kios di New Makassar Mall.

Selain itu juga permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan relokasi PKL di pasar sentral tersebut menjadi hal yang menarik untuk diketahui lebih lanjut dengan diadakannya penelitian di lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang memaparkan, menafsirkan dan

menganalisis data yang ada. Penelitian deskriptif menurut Sutopo (2002:111) yakni studi kasus yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mengetahui relevansi pengetahuan yang ditemukan di lapangan dengan pendekatan teori yang ada.

Sumber Data : 1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan yang akan diwawancarai antara lain: (a) Pedagang Kaki Lima di Jalan KH Ramli sampai dengan Jalan HOS Cokroaminoto yang sudah pindah di tempat kios PKL yang baru. (b) Kepala Pasar Sentral yakni di New Makassar Mall. (c) Aparat Kantor Pengelolaan PKL, yaitu Kepala Dinas bidang Pengelolaan PKL., (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya terbentuk publikasi-publikasi. Yaitu melalui catatan-catatan lapangan hasil observasi penelitian dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

## HASIL PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Makassar Raya atau bisa disingkat PD Pasar Makassar Raya adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang pemungutan distribusi pasar tradisional, seperti Pasar Sentral, Pasar Terong dan pasar tradisional lainnya. Perusahaan Daerah Makassar Raya di bentuk oleh Walikota Makassar berdasarkan perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002. Untuk kelancaran pelaksanaan relokasi Pedagang kaki lima di Pasar Sentral, Perusahaan Daerah Makassar Raya membentuk: (a) Perusahaan daerah Pasar New Mall yang di pimpin oleh Sudirman Lannurung. PD Pasar New Mall Makassar mempunyai tugas memungut retribusi pedagang kaki lima resmi yang berada di dalam dan diluar bangunan New Mall Makassar yang di tetapkan oleh Walikota Makassar. Kepala perusahaan daerah Pasar Makassar Raya melaporkan secara bersekala retribusi setiap harinya kepada Ketua PD pasar lalu melaporkan kembali kepada Walikota Makassar, (b) perusahaan daerah Pasar Makassar Raya yang di ketuai Oleh Walikota Makassar. PD Pasar Makassar Raya mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan

langkah-langkah yang di perlukan dalam rangka merelokasikan PKL yang berada di Pasar Tradisional di Kota Makassar sesuai dengan kebijakan, strategi, dan pedoman yang di tetapkan oleh Walikota Makassar.

Perusahaan daerah Pasar Makassar Raya melaporkan secara bersekala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua PD pasar lalu melaporkan kembali kepada Walikota Makassar.

Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Menurut Islamy (2004) kebijakan publik (public policy) adalah, “Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat namun pada kenyataannya hampir di setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dipastikan adanya masalah awal yang muncul sehingga Pemerintah tersebut melakukan suatu trobosan dengan membuat suatu kebijakan yang tepat dalam mengalami masalah tersebut. Sumber daya bahan galian merupakan salah satu potensi sumber

daya alam yang penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penunjang pembangunan.

Relokasi Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata di Kota Makassar terus meningkat sehingga PEMDA membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) penertiban bangunan dan pembinaan pedagang sector informal (PKL) dalam wilayah Kota Makassar dan yang terakhir Peraturan daerah kota makassar nomor 12 tahun 2014 tentang pengurusan pasar dalam daerah kota makassar bertujuan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian peneliti, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima di kota makassar bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor saling berhubung satu dengan yang lain antara golongan pelaku actor yang terlibat didalam kebijakan tersebut. Hal ini didukung dengan apa yang diungkapkan Charles O. Jones (dalam Wahab, 2001) yang menegaskan bahwa Suatu proses kebijakan, sedikitnya terdapat empat

golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis dan golongan reformis. Golongan – golongan tersebut yang sebagai aktor dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima yang saat ini berkembang pesat di kota makassar dengan alasan bahwa semakin banyaknya tingkat kelahiran sehingga pengangguran dan pedagang kaki lima berkembang pesat sebagai alternative pekerjaan yang muda di kerjakan.

Dalam mensukseskan kebijakan pemerintah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya mengadakan kegiatan sosialisasi dan mengundang para pedagang-pedagang Kaki Lima yang berada di jalan Jl. KH Ramli, Jl. KH Wahid Hasyim, dan Jl. HOS Cokroaminoto guna memberikan arahan tentang kebijakan relokasi tersebut adalah kebijakan yang terbaik demi untuk meningkatkan kesejahteraan PKL dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan sehingga dalam mengkaji lebih dalam tentang kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima peneliti menggunakan teori Edward III Pemilihan teori Edwards III didasarkan

pada implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil Agustino (2006:115), adapun teori tersebut adalah : komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi Edward III (1980) dalam Haedar (2010) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikor kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) Kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Komunikasi yang di lakukan PD Pasar Makassar Raya yaitu melakukan informasi kepada setiap pedagang kaki lima bahwa akan di adakan rapat bersama yang membahas tentang relokasi ke New Mall Makassar.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implemetasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2007) : Bagaimana jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Edward III dalam Haedar (2010) menyatakan pentingnya disposisi yang benar yang harus dimiliki oleh implementor agar dapat melaksanakan sebuah kebijakan dengan benar. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter yang penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur birokrasi yang baik akan membuat pelaksana kebijakan memberikan ruang bagi para pelaksana melakukan berbagai koordinasi kepada semua unit terkait sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Haedar (2010). Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi aspek pertama pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan, dan aspek dua adalah struktur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan membuat pelaksana kebijakan memberikan ruang bagi para pelaksana melakukan berbagai koordinasi kepada semua unit terkait sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas yang kemudian diolah dengan menggunakan model teori Edwar III yang terdiri dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:1) Komunikasi:belum baik/ditingkatkan. 2) sumber daya: belum baik/ditingkatkan. 3)Disposisi: sudah baik/ditingkatkan. 4)struktur birokrasi: sudah baik/ditingkatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam Implementasi Kebijakan dalam merelokasi PKL ialah aspek komunikasi dan sumber daya, sedangkan aspek yang sudah berjalan dengan baik adalah aspek disposisi dan struktur birokrasi.

Salah satu faktor yang mendukung relokasi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi akan kenyamanan, keamanan dan kebersihan lokasi PKL serta peningkatan daya beli masyarakat dengan adanya new mall makassar. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran adalah

Salah satu faktor yang mendukung relokasi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi akan kenyamanan, keamanan dan kebersihan lokasi PKL serta peningkatan daya beli masyarakat dengan adanya new mall makassar. Adapun faktor pendukung

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Faktor InternalDiantara faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil komunikasi adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pedagang itu sendiri. Seperti dalam temuan Fatmawati (2013) bahwa dalam pemilihan lokasi PKL dipengaruhi oleh kemudahan pencapaian, kemudahan dilihat dan kemudahan hubungan dengan aktifitas formal. Sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses keberadaan dan waktu para PKL tersebut memulai menjajakan dagangannya. 2) Faktor EksternalSelain dari faktor internal, komunikasi juga di pengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar Pedagang Kaki Lima. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua. Yaitu lingkungan yang aman, dan lingkungan yang bersih. merupakan bagian dari kehidupan pedagang kaki lima, karena dimana lingkungan tersebut tempat untuk mereka berusaha di dalamnya. lingkungan yang bersih sangat berpengaruh dalam peningkatan kemajuan usaha mereka karena tingkat ketertarikan costumer dalam berbelanja sangat baik ketika lingkungan itu bersih dan tertib.

Pendekatan yang menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dari sudut organisasi, prosedur, manajemen dan pengaruh pada perilaku tetapi tidak kurang memperhatikan realita-realita kekuasaan maka mustahil kebijakan dapat berhasil. Pernyataan wahab tersebut di benarkan oleh situasi relokasi pedagang kaki lima. Pernyataan wahab tersebut dibenarkan oleh situasi relokasi pedagang kaki lima di Jl. KH Ramli, Jl. KH Wahid Hasyim, dan Jl. HOS Cokroaminoto.

Koordinasi lintas sektoral juga menjadi faktor penghambat penerapan beberapa kebijakan terutama kebijakan yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Lintas sektoral ini sangat dibutuhkan terutama dalam upaya mengurangi pedagang kaki lima yang tidak resmi atau semrawut. PD Pasar yang mengembang amanah melakukan koodinasi antar sektor belum berfungsi optimal. Pelaksana harian (full time staff) yang berstatus tenaga kontrak sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk mengajukan usulan kepada ketua PD Pasar Makassar Raya dan jajarannya untuk melakukan koordinasi. Semua pihak merasa bekerja sendiri, merasa yang paling berperan dan mempunyai anggapan pihak yang lain tidak

melakukan apa-apa. Hal ini karena lemahnya koordinasi lintas sektor.

Lebih lanjut peneliti menemukan faktor penghambat dalam relokasi PKL seperti masih masih dibukanya akses penjualan diluar pasar new mall, edukasi ke PKL untuk ikut serta mensukseskan kebijakan pemerintah dalam menata kota masih minim, anggaran untuk relokasi PKL masih terbatas, mindset PKL yang sudah terlanjur nyaman berjualan di bahu jalan sehingga banyak PKL masih memili berjualan di luar Gedung new mall apalagi menurut PKL penghasilan pasca relokasi menurun daripada sebelumnya.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu

program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi pemerintah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar dilakukan dengan cara: mengomunikasikan relokasi melalui diskusi, rapat dan sosialisasi; melakukan peningkatan sumberdaya dalam bentuk menambah jumlah staf, menambah fasilitas lain berupa baliho, kenyamanan lapak, dan kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar; melakukan disposisi dalam bentuk pendampingan penataan dan pengamanan pedagang yang ingin direlokasi: dan memudahkan struktur birokrasi agar lebih efektif dalam penanganan relokasi, (2) Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar, terdiri atas: faktor internal, berupa keadaan diri pedagang untuk mau

direlokasi ke tempat yang lebih nyaman dan tidak memberatkan dari sisi iuran dan faktor eksternal berupa proses penataan lokasi yang lebih baik melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk kenyamanan penggunaan sarana. Sementara Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Makassar, yaitu: lemahnya koordinasi lintas sektoral dinas-dinas yang terkait, lokasi yang tidak strategis, dan harga lapak yang tidak terjangkau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010
- Fatmawati Putri, 2013. Kesiapsiagaan Siswa Di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Unniversitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haedar Akib Guru 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana: Besar Ilmu Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 Universitas Negeri Makassar
- Islamy, M.Irfan. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara.
- Othenk. (2008). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. Tersedia di

- <http://literaturbook.blogspot.co.id>  
(diakses tanggal 2 Maret 2016)
- Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Cetakan Ke Tiga. Pustaka Pelajar
- Suratman, Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Makassar: Capiya Publising. 2017.
- Suharto . 2002. Implementasi Kebijakan. Surakarta: : Refika Aditama
- Tahir,Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solihin Abdul. 2010. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Pt Bumi Aksara.